

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TENTANG TATA RUANG

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG KELOMPOK : UNDANG-UNDANG		
No	Nomor Surat	Perihal
1	UU No. 5 Tahun 1960	Peraturan dasar pokok-pokok Agraria
2	UU No. 9 Tahun 1960	Pokok-pokok kesehatan
3	UU No. 2 Tahun 1966	Hygiene
4	UU No. 4 Tahun 1967	Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
5	UU No. 5 Tahun 1967	Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
6	UU No. 11 Tahun 1974	Pengairan
7	UU No. 13 Tahun 1980	Jalan
8	UU No. 20 Tahun 1982	Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara RI
9	UU No. 5 Tahun 1983	Landasan kontineer zone ekonomi eksklusif
10	UU No.5 Tahun 1984	Perindustrian
11	UU No. 9 Tahun 1985	Perikanan
12	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
13	<u>UU No. 4 Tahun 1992</u>	<u>Perumahan dan Permukiman</u>
14	UU No. 24 Tahun <u>1992</u>  (Persandingan)	<u>Penataan Ruang</u>  (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader)  (Klik  untuk download)
15	UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan lingkungan hidup
16	<u>UU No. 22 Tahun 1999</u>	<u>Pemerintahan Daerah</u>
17	UU No. 25 Tahun 1999	Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

**INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : PP**

No	Nomor Surat	Perihal
1	PP No. 33 Tahun 1970	Perencanaan Hutan
2	PP No. 26 Tahun 1980	Jalan
3	PP No. 22 Tahun 1982	Tata Pengaturan Air
4	PP No. 23 Tahun 1982	Irigasi
5	PP No. 29 Tahun 1982	Analisis Dampak Lingkungan
6	PP No. 5 Tahun 1990	Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
7	PP No. 8 Tahun 1990	Jalan Tol
8	PP No. 20 Tahun 1990	Pengendalian Pencemaran Air
9	PP No. 42 Tahun 1990	Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jati LUHUR”
10	PP No. 27 Tahun 1991	Irigasi
11	PP No. 35 Tahun 1991	Sungai
12	<u>PP No. 69 Tahun 1996</u>	<p><u>Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader)</u></p> <p align="right">(Klik  untuk download)</p>
13	<u>PP No. 47 Tahun 1997</u>	<u>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</u>
14	<u>PP No. 10 Tahun 2000</u>	<u>Ketelitian Peta</u>

**INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : KEPPRES**





No	Nomor Surat	Perihal
1	Keppres No. 35/1973	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2	Keppres No. 41/1973	Daerah Industri Pulau Batam
3	Keppres No. 13/1976	Perencanaan Jabotabek
4	Keppres No. 27/1980	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan Tingkat II
5	Keppres No. 54/1980	Kebijaksanaan Mengenai Pencatatan Sawah
6	Keppres No. 15/1983	Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisata
7	Keppres No. 23/1983	Tugas-tugas pokok Menteri Negara dan Ketua Bappenas
8	Keppres No. 48/1983	Penataan Kawasan Puncak
9	Keppres No. 8/1985	Badan Kebijakan Perumahan Nasional
10	Keppres No. 79/1985	Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
11	Keppres No. 52/1987	Terminal Peti Kemas
12	Keppres No. 53/1989	Kawasan Industri
13	Keppres No. 23/1990	adan Pengendalian Dampak Lingkungan
14	Keppres No. 32/1990	Pengelolaan Kawasan Lindung
15	Keppres No. 33/1990	Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
16	Keppres No. 75/1993	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
17	Keppres No. 98/1993	Perubahan Keppres No. 53/1989 tentang Kawasan Industri
18	Keppres No. 16 Tahun 1994	Pelaksanaan APBN sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 6 Tahun 1999
19	Keppres No. 7 Tahun 1998	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan atau pengelolaan struktur
20	Keppres No. 136 Tahun 1998	Pokok-pokok organisasi lembaga Pemerintah Non Departemen
21	<u>Keppres No. 114 Tahun 1999</u>	<u>Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur</u>
22	Keppres No. 134 Tahun 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
23	Keppres No. 136 Tahun 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
24	Keppres No. 389 Tahun 1999	Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimbangwil
25	Keppres No. 355/M/Tahun 1999	Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional
26	Keppres No. 12 Tahun 2000	Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum
27	<u>Keppres No. 150 Tahun 2000</u>	<u>Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu</u>

**INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : INPRES**

No	Nomor Surat	Perihal
1	Inpres No. 1/1969	Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)
2	Inpres No. 9/1973	Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya
3	Inpres No. 1/1976	Sinkromisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
4	Inpres No. 13/1976	Perencanaan Jabotabek
5	Inpres No. 2/1984	Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
6	Inpres No. 7/1987	Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata
7	<u>Inpres No. 5/1990</u>	<u>Peremajaan Permukiman Rumah yang berada di atas tanah negara</u>

**INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : PERMEN/KEPMEN**

No	Nomor Surat	Perihal
1	Permendagri No. 9.1982	Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah
2	Permendagri No. 7.1986	Penetapan Batas Wilayah kota di seluruh Indonesia
3	Permendagri No. 1/1987	Penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum, dan fasilitas sosial kepada Pemda
4	Permendagri No. 2/1987	Pedoman Penyusunan Rencana Kota
5	Permendagri No. 22/1989	Tatalaksana Penerbitan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak
6	Permendagri No. 12 Tahun 1992	Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
7	Permen PU No. 39/PRT/1989	Pembagian wilayah sungai
8	Permen PU No. 42/PRT	Tata laksana pengerahan jaringan irigasi kecil berikut wewenang pengurusan kepada perkumpulan Petani Pemakai Air
9	Permen PU No. 48/PRT/1989	Tata Laksana Pengerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengukurannya kepada Petani Pemakai Air
10	Permen PU No. 42 Tahun 1990	Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai
11	Permen PU No. 45/PRT/1990	Pengendalian mutu air pada sumber – sumber air
12	Permen PU No. 48/PRT/1990	Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai
13	Permen PU No. 49/PRT /1990	Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air
14	Permen PU No. 52/PRT/1991	Kebijaksanaan umum P4S
15	Permen PU No. 63/PRT/1993	Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai daerah penguasaan sungai
16	Permen PU No. 64/PRT/1993	Reklamasi Rawa
17	Permen PU No. 65/PRT/1993	Penyuluhan Pengairan
18	Permen PU No. 72/PRT/1993	Keamanan Bendungan
19	Kepmen PU No. 640/1986	Perencanaan Tata Ruang Kota
20	Kepmen PU No. 458/KPTS/1986	Ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c
21	Kepmen PU No. 459/KPTS/1986	Ketentuan Pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c di daerah Tk. I Jabar
22	Kepmen PU No. 640/1986	Perencanaan Tata Ruang Kota
23	Kepmen PU No. 98/KPTS/1993	Organisasi keamanan bendungan
24	Kepmen PU No. 401/PRT/1997	Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan ASA untuk pertambangan umum
25	Kepmen Kimbangwil	Pengisian Jabatan Pimpinan Eselon II di lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
26	Kepmen Permukiman & Pengembangan Wilayah No : 03/KPTS/M/XII/1999	Organisasi dan tata kerja Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
27	<u>Kepmen Permukiman & Prasarana Wilayah No : 327/KPTS/M/2002</u>	<u>Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang</u>
28	Mendagri No. 34/1986No. 48/1983	Pelaksanaan Permendagri No. 7/1986 tentang Penetapan Batas-batas wilayah kota di seluruh Indonesia
29	Mendagri No. 14/1988	Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan
30	Instruksi Mendagri No. 42 Tahun 1995	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

PRODUK-PRODUK PERATURAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG		
No	Nama Peraturan	Status
1	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Air	Draft RPP sudah dibahas pada tingkat eselon I
2	RPP tentang Review dan Penyusunan kembali RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi	Draft RPP baru dibahas pada tingkat Eselon II
3	PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Telah disahkan pada tanggal 30 Desember 1997 (PP no 47 th 1997)
4	RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan	Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no 22 tahun 1999
5	RPP tentang Penataan Ruang Perdesaan	Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no.22 tahun 1999
6	RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Tertentu	Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no.22 tahun 1999
7	RPP tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader) (Klik  untuk download)	Draft RPP RTRWN (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader) (Klik  untuk download)
8	Rancangan Kepmen tentang Pedoman Review dan penyusunan kembali RTRW Kabupaten dan Propinsi	Sudah dibahas di BKTRN
9	Kepmen tentang Penataan Ruang Kota	Sudah disyahkan pada tahun 1992
10	Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau (RTRWP) versi 17 Oktober 2003	Draft RTRWP versi 17 Oktober 2003
11	Rancangan Kepres Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan -Serawak Sabah versi 16 Oktober 2003	Draft Rakepres KASABA versi 16 Oktober 2003
12	Rancangan Kepres Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur versi 14 Juni 2004 (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader) (Klik  untuk download)	Draft Rakepres Jabodetabek Puncak versi 14 Juni 2004 (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader) (Klik  untuk download)

Sumber : Ditjen Penataan Ruang
Tanggal Updating : 08/27/2004 11:39:40
 Copy Right Administrator Web Taru 2003